

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Wibowo, *Perilaku Konsumen & Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020)
- Aditya, Wardhana., Rustandi Budi Kertawinata., Syahputra, *Bisnis Internasional*, (Bandung: PT. Karya Manunggal Lithomas, 2014)
- H, Wau, *Kewirausahaan UMKM di Desa*, (Jakarta: Publish Buku Unpri Press, 2022)
- Idris Muhmmad, Patarai, *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*, (Makasar: De La Macca, 2020)
- N. Saputri., M.I., Freedy, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'*, (Jakarta: Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), 2018) Press, 2022)
- R. Katharina, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020)
- R. Kathrina, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*, (Jakarta: S.P. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019)

Jurnal

- Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, dan Sumardjidjati, “*Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya*”, *Jurnal Perspektif Hukum*, volume 17 (2), 2017, DOI: 10.30649
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I, “*Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk*”, *Jurnal Publika*, Volume 7, Nomor 4, 2019, DOI: 10.26740
- Fatkhuri, “*Korupsi dalam Birokrasi dan Pencegahannya*”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2019, DOI: 10.25139
- H.A Muslimin, “*Beberapa Azas-Azas dan pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*”, (Bandung: Alumni, 1982) sebagaimana dikutip oleh Dewi Tresya, Ima Mayasari, dan Abdul Azis Suhendra, “*Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia*”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 5 (2-2), 2019, DOI: 10.32697
- Jayanti Arvi Setiani, Priyanto Susiloadi, “*Analisis Kesuksesan Pelayanan Perizinan Berbasis Online Single Submission pada Dinas Penanaman*

- Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang*”, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Volume 3, Nomor 1, 2020, DOI: 10.20961
- Kusumaningsih, R., & Azzahra, F, “*Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara El*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, Vol.8(2), 2021, DOI: 10.59635
- Muhammad Zainul Arifin dan Irsan, “*Korupsi Perizinan dalam Perjalanan Otonomi Daerah*” sebagaimana dikutip oleh Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, “*Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*”, Jurnal Antikorupsi, Volumen 6 (2), Tahun 2020, DOI: 10.21009

Peraturan Perundang – undangan

- Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Referensi lainnya

- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo. “DPMPTSP Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS.” *DPMPT Kulon Progo*. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss>, diakses pada 20 Oktober 2024